

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN  
BATANGKALUKU

# LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II

2023



JL. MALINO KM.3, TAMARUNANG, KEC. SOMBA OPU,  
KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN 92111.  
KECAMATAN : SOMBA OPU



**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

**BBPP BATANGKALUKU**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPP Batangkaluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BBPP Batangkaluku. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 31 Desember 2023  
Kepala Balai Besar,



Muhammad Sidiq, S.TP. MM  
NIP. 1977042120030121001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
  - A. Penjelasan Umum
  - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
    - B.2. Belanja
    - B.3. Belanja Pegawai
    - B.4. Belanja Barang
    - B.5. Belanja Modal
      - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
    - C.1. Aset Lancar
      - C.1.1. Persediaan
    - C.2. Aset Tetap
      - C.2.1. Tanah
      - C.2.2. Peralatan dan Mesin
      - C.2.3. Gedung dan Bangunan
      - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
      - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
    - C.3. Aset Lainnya
      - C.3.1. Aset Tak Berwujud
      - C.3.2. Aset Lain-lain
      - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
    - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
      - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
      - C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka
    - C.5. Ekuitas
      - C.5.1. Ekuitas
  - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
    - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
    - D.2. Beban Pegawai
    - D.3. Beban Persediaan
    - D.4. Beban Barang dan Jasa
    - D.5. Beban Pemeliharaan
    - D.6. Beban Perjalanan Dinas
    - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
    - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
    - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANGKALUKU**

JALAN POROS MALINO KM. 03, SUNGGUMINASA, KAB. GOWA 92112

TELEPON : 0411-866396, FAX : 866570

WEBSITE : <http://bbppbatangkaluku.bpsdmp.pertanian.go.id>, EMAIL : [infobbpp@pertanian.go.id](mailto:infobbpp@pertanian.go.id)

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sungguminasa, 31 Desember 2023

Kapala Balai Besar,

Muhammad Sidiq, S.TP. MM

NIP. 1977042120030121001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.232.511.428,00 atau mencapai 113,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.087.485.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp39.740.024.041,00 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp39.787.116.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp180.631.590.111,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp625.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp179.164.120.220,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.466.844.891,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.534.369.607,00 dan Rp179.097.220.505,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.158.724.373,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.391.738.055,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-24.233.013.682,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp-221.263.595,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-24.454.277.277,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp165.265.182.597,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-24.454.277.277,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-128.953.860,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp38.415.269.044,00

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp179.097.220.504,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BBPP BATANGKALUKU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.087.485.000,00	1.232.511.428,00	113	1.780.376.274,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1.087.485.000,00</b>	<b>1.232.511.428,00</b>	<b>113</b>	<b>1.780.376.274,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	4.729.678.000,00	4.726.491.811,00	100	5.053.017,00
Belanja Barang	B.4.	19.032.117.000,00	19.011.016.570,00	100	9.807.820.470,00
Belanja Modal	B.5.	16.025.321.000,00	16.002.515.660,00	100	1.550.278.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>39.787.116.000,00</b>	<b>39.740.024.041,00</b>	<b>100</b>	<b>16.411.116.105,00</b>

## II. NERACA

**BBPP BATANGKALUKU**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Persediaan	C.1.1.	625.000,00	2.552.500,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>625.000,00</b>	<b>2.552.500,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	113.554.399.000,00	113.554.399.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19.620.397.296,00	17.486.718.055,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	71.281.571.296,00	58.642.962.836,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.076.062.319,00	3.291.297.319,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	87.824.550,00	87.824.550,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(30.395.259.287,00)	(27.757.264.483,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>177.224.995.174,00</b>	<b>165.305.937.277,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	34.800.000,00	34.800.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	0	0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.3.	1.432.044.891,00	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.466.844.891,00</b>	<b>34.800.000,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>178.692.465.065,00</b>	<b>165.343.289.777,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	1.510.879.451,00	76.041.680,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	35.228.556,00	2.065.500,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.546.108.007,00</b>	<b>78.107.180,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>1.546.108.007,00</b>	<b>78.107.180,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.	177.146.357.058,00	165.265.182.597,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>177.146.357.058,00</b>	<b>165.265.182.597,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>178.692.465.065,00</b>	<b>165.343.289.777,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BBPP BATANGKALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.158.724.373,00	1.668.008.248,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.158.724.373,00</b>	<b>1.668.008.248,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	4.729.481.211,00	5.090.028.595,00
Beban Persediaan	D.3.	72.601.500,00	46.311.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	11.092.376.160,00	6.049.789.240,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.131.992.760,00	1.172.531.273,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	6.550.777.130,00	2.277.706.527,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	165.000.000,00	270.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	3.610.372.740,00	2.840.393.826,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>27.352.601.501,00</b>	<b>17.746.760.961,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(26.193.877.128,00)</b>	<b>(16.078.752.713,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	(221.263.595,00)	122.336.000,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	40.623.999,00	122.336.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	261.887.594,00	0
Surplus/Defisit Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	0,00	2.425.026,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13.	0,00	2.425.026,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14.	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(221.263.595,00)</b>	<b>124.761.026,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(26.415.140.723,00)</b>	<b>(15.953.991.687,00)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BBPP BATANGKALUKU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	<b>165.265.182.597,00</b>	<b>165.534.138.135,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	<b>(26.415.140.723,00)</b>	<b>(15.956.512.937,00)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	<b>(118.953.860,00)</b>	<b>0,00</b>
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	(118.953.860,00)	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	<b>38.415.269.044,00</b>	<b>15.687.557.399,00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	<b>11.881.174.461,00</b>	<b>(268.955.538,00)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>177.146.357.058,00</b>	<b>165.265.182.597,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

#### 1. Organisasi

##### a. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian **Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, mempunyai mandat bersifat regional dan nasional, yang memiliki kekhasan bidang Mekanisasi Pertanian.

##### b. Tugas Pokok dan Fungsi

**Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, mempunyai Tugas Pokok **“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”**.

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- 1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama
- 2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan
- 3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian
- 4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur
- 5) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri
- 6) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- 7) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
- 8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian
- 9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian
- 10) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya

- 11) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- 12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- 13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- 14) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani
- 15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian
- 16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan,
- 17) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
- 18) Pengelolaan urusan kepegawaian , keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Batangkaluku.

Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

### c. Wilayah Kerja

Untuk optimalisasi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian berjalan efektif dan efisien, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, melalui Surat Keputusan No. 141/Kpts/OT.020/II/08/2018, telah menetapkan pembagian wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut wilayah kerja BBPP Batangkaluku, meliputi :

- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Utara, dan
- Provinsi Gorontalo

Sedang untuk tugas penyelenggaraan Diklat yang berhubungan dengan Mekanisasi Pertanian dan Pengelolaan Lahan dan Air sesuai dengan ke khasan BBPP Batangkaluku, maka wilayah kerjanya ditetapkan secara nasional.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPP Batangkaluku. Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada tahun 2023 maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

## **A.3. Basis Akuntansi**

BBPP Batangkaluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BBPP Batangkaluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BBPP Batangkaluku yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, BBPP Batangkaluku telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	280.720.000,00	483.795.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	146.500.000,00	603.690.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.250.000,00	
Pendapatan Denda	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>428.470.000,00</b>	<b>1.087.485.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.206.848.000,00	4.729.678.000,00
Belanja Barang Operasional	4.025.182.000,00	3.885.215.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.367.537.000,00	6.122.472.000,00
Belanja Barang Persediaan	77.000.000,00	70.675.000,00
Belanja Jasa	1.096.400.000,00	1.086.189.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.063.848.000,00	1.132.069.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.310.364.000,00	6.570.497.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	180.000.000,00	165.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.033.000,00	2.865.428.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.398.400.000,00	13.159.893.000,00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Modal Irigasi	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.590.612.000,00</b>	<b>39.787.116.000,00</b>

#### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.232.511.428,00 atau mencapai 113,34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.087.485.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

##### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Kode Akun	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	.%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	483.795.000,00	618.112.013,00	127,76
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.250.000,00	125.000,00	10,00
4258	Pendapatan Denda	0,00	11.936.415,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	602.440.000,00	602.338.000,00	99,98
	<b>Jumlah</b>	<b>1.087.485.000,00</b>	<b>1.232.511.428,00</b>	<b>113,34</b>

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat beberapa pendapatan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha merupakan pendapatan dari penjualan hasil pertanian dan Olahan Hasil Pertanian, Perkebunan, peternakan dan budidaya, pendapatan sewa lahan, gedung dan bangunan, pendapatan dari penjualan gedung dan bangunan, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan dari kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan atau Pelatihan Fungsional Ahli/Terampil dan Alih Kelompok bagi Penyuluh Pertanian serta pendapatan dari kunjungan wisata pertanian.
3. Pendapatan jasa lainnya merupakan pendapatan dari sewa penggunaan alat pertanian/laboratorium.

4. Pendapatan Denda merupakan pendapatan dari Denda pekerjaan akibat keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan dan gedung sesuai waktu yang telah disepakati.

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar **-30,77%** dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BBPP Batangkaluku adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	618.112.013,00	609.030.348,00	1,49
Pendapatan Jasa Lainnya	125.000,00	800.000,00	(84,38)
Pendapatan Lain-Lain	0,00	2.425.026,00	(100,00)
Pendapatan Denda	11.936.415,00	0,00	0
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	602.338.000,00	1.168.120.900,00	(48,44)
<b>Jumlah</b>	<b>1.232.511.428,00</b>	<b>1.780.376.274,00</b>	<b>(30,77)</b>

## B.2 BELANJA

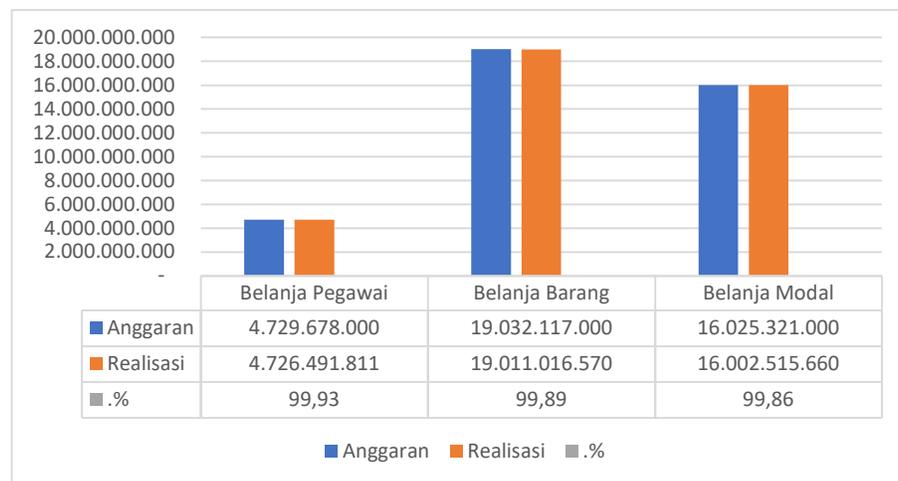
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp 39.740.024.041,00 atau naik sebesar **99,88%** dari anggaran belanja sebesar Rp 39.787.116.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja  
per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	4.729.678.000,00	4.726.491.811,00	99,93
Belanja Barang	19.032.117.000,00	19.011.016.570,00	99,89
Belanja Modal	16.025.321.000,00	16.002.515.660,00	99,86
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>39.787.116.000,00</b>	<b>39.740.024.041,00</b>	<b>99,88</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950.716,00</b>	<b>0,00</b>

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
<b>Total Belanja</b>	<b>39.787.116.000,00</b>	<b>39.740.024.041,00</b>	<b>99,88</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **142,15%** dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena naiknya Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	4.726.491.811,00	5.053.017.635,00	(6,46)
Belanja Barang	19.011.016.570,00	9.807.820.470,00	93,84
Belanja Modal	16.002.515.660,00	1.550.278.000,00	932,24
<b>Total Belanja</b>	<b>39.740.024.041,00</b>	<b>16.411.116.105,00</b>	<b>142,15</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.726.491.811,00 dan Rp 5.053.017.635,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -

**6,46%** dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat pegawai yang pensiun sebanyak 4 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.726.491.827,00	5.053.019.049,00	(6,46)
Belanja Lembur	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.726.491.827,00</b>	<b>5.053.019.049,00</b>	<b>(6,46)</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>16,00</b>	<b>(1.414,00)</b>	<b>(101,13)</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.726.491.811,00</b>	<b>5.053.017.635,00</b>	<b>(6,46)</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.011.016.570,00 dan Rp 9.807.820.470,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar **93,84%** dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena bertambahnya kegiatan Kewirausahaan dan Kerjasama dari stakeholder di Tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.885.172.080,00	3.456.031.590,00	12,42
Belanja Barang Non Operasional	6.122.422.410,00	1.833.696.500,00	233,88
Belanja Barang Persediaan	70.674.000,00	44.988.000,00	57,10
Belanja Jasa	1.086.178.190,00	753.991.580,00	44,06
Belanja Pemeliharaan	1.131.992.760,00	1.176.855.000,00	(3,81)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.569.442.030,00	2.279.287.781,00	188,22
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	165.000.000,00	270.000.000,00	(38,89)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>19.030.881.470,00</b>	<b>9.814.850.451,00</b>	<b>93,90</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>19.864.900,00</b>	<b>7.029.981,00</b>	<b>182,57</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.011.016.570,00</b>	<b>9.807.820.470,00</b>	<b>93,84</b>

## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.002.515.660,00 dan Rp 1.550.278.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **932,24%** dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

### Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.426.000,00	478.778.000,00	498,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.157.175.460,00	890.500.000,00	1377,50
Belanja Modal Irigasi	0,00	181.000.000,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.022.601.460,00</b>	<b>1.550.278.000,00</b>	<b>933,53</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>20.085.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.002.515.660,00</b>	<b>1.550.278.000,00</b>	<b>932,24</b>

### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.860.369.200,00 dan Rp 478.778.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **497,43%** dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena tingginya pengadaan peralatan kantor yaitu sebanyak 248 unit.

### Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.426.000,00	478.778.000,00	498,49
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.865.426.000,00</b>	<b>478.778.000,00</b>	<b>498,49</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>5.056.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.860.369.200,00</b>	<b>478.778.000,00</b>	<b>497,43</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 625.000,00 dan Rp 2.552.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	625.000,00	2.552.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.552.000,00</b>

### C.2. ASET TETAP

#### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp113.554.399.000,00 dan Rp113.554.399.000,00.

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.620.397.296,00 dan Rp17.486.718.055,00.

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2023
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.426.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.865.426.000,00</b>
	<b>Pengembalian</b>	<b>5.056.800,00</b>
	<b>Jumlah Netto</b>	<b>2.860.369.200,00</b>

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>17.486.718.055,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	2.865.426.000,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
Penghapusan	(726.689.959,00)
Koreksi Pencatatan Nilai berkurang	(5.056.800,00)
Reklasifikasi Keluar	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>19.620.397.296,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>19.620.397.296,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp2.865.426.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), berasal dari Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp.2.865.426.000, dengan Rincian sebagai Berikut:

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Buah)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• Pembelian	<b>248</b>	<b>2.865.426.000</b>	
• Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	560.200.000	
• Mesin Bor Listrik	2	4-050.000	
• Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	175.000.000	
• Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	1	12.070.000	
• Lemari Kayu	15	98.250.000	
• Filing Cabinet Besi	3	19.800.000	
• Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	1	146.000.000	
• Laser Pointer	1	1.170.000	
• LCD Projector/Infocus	1	8.155.000	
• Flip Chart	2	2.850.000	

• Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	3.813.000	
• Meja Kerja Besi/Metal	5	17.500.000	
• Meja Kerja Kayu	65	317.150.000	
• Kursi Besi/Metal	16	41.600.000	
• Meja Rapat	1	58.920.000	
• Meja Resepsionis	3	18.750.000	
• Kasur/Spring Bed	30	126.000.000	
• Mesin Pemotong Rumput	3	20.800.000	
• A.C. Split	37	277.300.000	
• Televisi	5	29.564.000	
• Loudspeaker	1	23.000.000	
• Mimbar/Podium	1	5.573.000	
• Tangga Hidrolik	1	12.191.000	
• Alat Rumah Tangga Lainnya	15	18.750.000	
• Microphone/Wireless MIC	3	9.270.000	
• Mixer Sound Sistem	1	1.500.000	
• Meja Editing Film	1	1.500.000	
• Wireless Amplifier	1	6.500.000	
• Perangkat BTS	1	180.000.000	
• Tiang Antena Hidrolik Portable	2	16.500.000	
• Genset	1	391.000.000	
• Stabilizer	1	10.905.000	
• P.C Unit	3	48.210.000	
• Lap Top	9	141.250.000	
• Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	31.385.000	
• Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	9.700.000	
• Laptop Case	1	19.250.000	

2. Mutasi Kurang selama periode pelaporan sebesar -Rp. 731.746.759,- (Mines Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), berasal dari Penghentian Penggunaan Peralatan dan mesin berupa peralatan kantor sebanyak 562 unit senilai -Rp.726.689.959,- ditambah Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai -Rp. 5.056.800.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.71.281.571.296,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp58.642.962.836,-, Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp.13.157.175.460,- dan Mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar -Rp.518.567.000,-

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
<b>A. Saldo Awal</b>	<b>58.642.962.836</b>
<b>B. Mutasi Tambah</b>	<b>13.157.175.460</b>
Pembelian	496.719.000
Pengembangan dengan KDP	8.921.082.660
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.729.373.800
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	10.000.000
<b>C. Mutasi Kurang</b>	<b>(518.567.000)</b>
Koreksi Pencatatan	(15.029.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(503.538.000)
<b>D. Saldo Akhir</b>	<b>71.281.571.296</b>

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan Senilai Rp.13.157.175.460,- (Tiga Belas Miliar Seratus Lima` puluh Tuju Juta Seratus Tuju Puluh bLima Ribu empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Berasal dari :
  - a. Pembelian Nilai Gedung Bangunan senilai Rp.496.719.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tuju Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), berasal dari:

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• <b>Pembelian</b>	<b>3</b>	<b>496.719.000</b>	
• Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	162.350.000	
• Gedung Pos Jaga Permanen	1	168.869.000	
• Gedung Garasi/Pool Permanen	1	165.500.000	

- b. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Senilai Rp. 3.729.373.800,- (Tiga Miliar Tuju Ratus dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus tuju Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Rupiah), berasal dari :

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• <b>Penyelesaian Pembangunan dengan KDP</b>	<b>3</b>	<b>3.729.373.800</b>	
• Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	165.000.000	

• Bangunan Gedung Tempat Olah raga Lainnya	1	3.399.373.800	
• Bangunan untuk Kandang	1	165.000.000	

- c. Pengembangan dengan KDP Nilai Gedung Bangunan senilai Rp.8.921.082.660,-(Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), berasal dari :

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• <b>Pengembangan GB Melalui KDP</b>	<b>6</b>	<b>8.921.082.660</b>	
• Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.067.282.800	
• Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	940.554.000	
• Asrama Permanen	2	4.559.106.860	
• Tugu/Tanda Batas administrasi Kepemilikan	2	354.150.000	

- d. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

2. Mutasi Kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp.(518.567.000),-(Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berasal dari :

- a. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Bangunan senilai Rp. 15.029.000,- (Lima Belas Juta Dua Puluh sembilan Ribu rupiah)

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Buah)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• Pencatatan Nilai Berkurang	<b>1</b>	<b>(15.029.000)</b>	0
• Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	(10.000.000)	0
• Bangunan Terbuka Lainnya	1	(5.029.000)	0

- b. Penghentian Aset dari Penggunaan, Gedung Bangunan senilai Rp. 503.538.000,-(Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga puluh Delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian jenis transaksi	Kuantitas (Buah)	Nilai	
		Intra	Ekstra
• Penghentian Aset dari Penggunaan	<b>6</b>	<b>(503.538.000)</b>	0

• Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	(307.614.000)	0
• Rumah Negara Gol.2 Tipe E Perman	4	(195.924.000)	0

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.076.062.319,00 dan Rp3.291.297.319,00.

Dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

##### Jalan dan Jembatan:

Uraian	Jumlah
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.542.491.000</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(215.235.000)</b>
Transfer Keluar	(215.235.000)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.327.256.000</b>

Terdapat mutasi pengurangan atas nilai Jalan Dan Jembatan senilai -Rp. 215.235.000,- yang merupakan Transfer keluar ke Polbangtan Gowa.

##### Irigasi:

Uraian	Jumlah
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.283.305.000</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.283.305.000</b>

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Irigasi.

##### Jaringan:

Uraian	Intrakomptabel
<b>Saldo Awal</b>	<b>465.501.319</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>465.501.319</b>

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp87.824.550,00 dan Rp87.824.550,00.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp.30.395.259.287,00 dan -Rp.27.754.733.233,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17.486.718.055,00	(15.698.954.721,00)	1.787.763.334,00
2.	Gedung dan Bangunan	58.443.212.836,00	(13.065.475.842),00	45.377.736.994,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.291.297.319,00	(1.630.828.724,00)	1.660.468.595,00
4.	Aset Tetap Lainnya	87.824.550,00	0,00	87.824.550,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>79.309.052.760,00</b>	<b>-30.395.259.287,00</b>	<b>48.913.793.473,00</b>

### C.3. ASET LAINNYA

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.800.000,00 dan Rp34.800.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	34.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.800.000,00</b>

#### C.3.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Aset Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.432.044.891,00 dan Rp0,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan

Dana yang dititipkan kepada Perusahaan untuk penyelesaian pekerjaan Renovasi Gedung BBPP Batangkaluku. Adapun Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	SPM		SP2D		Uraian	Nilai Bruto	Nilai Bersih
	No. SPM	Tgl. SPM	No. SP2D	Tgl. SP2D			
1	00007A	05/01/2024	249991303004008	11/01/2024	Pembayaran PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG KANTOR sesuai BAST Nomor 573/BAST/PL.03D/1.17.11/2023 tanggal 29-12-2023	37.500.000	37.500.000
2	00008A	05/01/2024	249991303004088	12/01/2024	Pembayaran PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG ASRAMA BAWAKARAENG sesuai BAST Nomor 498/BAST/PL.030/1.17.1/12/2023 Tanggal 29-12-2023	42.500.000	42.500.000
3	00006A	05/01/2024	249991302001943	11/01/2024	Pembayaran PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA sesuai BAST Nomor 520/BAST/PL.030/1.17.1/12/2023 Tanggal 29-12-2023	42.500.000	42.500.000
4	00004A	05/01/2024	249991304001424	09/01/2024	Pembayaran RENOVASI ASRAMA BAWAKARAENG sesuai BAST Nomor B.3149/PL.020/1.17.1/12/2023 Tanggal 31-12-2023	329.333.800	329.333.800
5	00003A	05/01/2024	249991303003957	11/01/2024	Pembayaran PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR sesuai BAST Nomor B.3151/PL.020/1.17.1/12/2023 Tanggal 31-12-2023	468.381.179	468.381.179
6	00002A	05/01/2024	249991303003955	11/01/2024	Pembayaran PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA sesuai BAST Nomor B.3150/PL.020/1.17.1/12/2023 Tanggal 31-12-2023	511.829.912	511.829.912
<b>TOTAL</b>						<b>1.432.044.891</b>	<b>1.432.044.891</b>

### C.3.3. Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

### C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,00.

#### C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.499.141.051,00 dan Rp 76.041.680,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BBPP Batangkaluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	44.568.400,00	41.579.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34.266.160,00	34.462.680,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.432.044.891,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.510.879.451,00</b>	<b>76.041.680,00</b>

Penjelasan terhadap utang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan beban Uang Makan PNS bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari karena anggaran uang makan tidak mencukupi sebesar Rp. 32.830.000,00. Ditambah Beban Pegawai untuk PPPK sebesar Rp. 11.738.400,00 yang terdiri dari:
  - a. Gaji Pokok P3K sebesar Rp. 8.899.500,00.
  - b. Tunjangan Istri/Suami P3K sebesar Rp. 593.300,00.
  - c. Tunjangan Anak P3K sebesar Rp. 118.660,00.
  - d. Tunjangan Fungsional P3K sebesar Rp. 540.000,00.
  - e. Tunjangan Beras P3K sebesar Rp. 506.940,00.
2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp. 34.266.160,00 terdiri dari:
  - a. Beban Listrik bulan Desember 2023 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp.23.909.800,00.
  - b. Beban Air bulan Desember 2023 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 10.356.360,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.432.044.891,00.

##### C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 35.228.556,00 dan Rp 2.065.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun

barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	35.228.556,00	2.065.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.228.556,00</b>	<b>2.065.500,00</b>

Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga berupa sewa lahan mesin ATM Bank Mandiri sebesar Rp. 48.778.000,- selama 3 tahun dan telah jatuh tempo sebesar Rp. 13.549.444,- sehingga yang menjadi pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp. 35.228.556,-.

#### C.5. EKUITAS

##### C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp177.146.357.058,00 dan Rp165.265.182.597,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

##### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.158.724.373,00 dan Rp1.668.008.248,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	125.000,00	800.000,00	(84,38)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	595.848.000,00	1.166.620.900,00	(48,93)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	6.490.000,00	1.500.000,00	332,67

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	431.875.000,00	411.525.000,00	4,95
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	66.000.910,00	36.602.700,00	80,32
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	46.449.048,00	50.959.648,00	(8,85)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.936.415,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.158.724.373,00</b>	<b>1.668.008.248,00</b>	<b>(30,53)</b>

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-30,53%** dari tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sebesar **-84,38%**, berkurangnya pendapatan layanan Pendidikan sebesar **-48,93%** akibat dari berkurangnya kegiatan pelatihan Kerjasama fungsional penyuluh pertanian, dan berkurangnya pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar **8,85%** akibat dari berkurangnya rumah dinas karena beberapa rumah dinas yang tidak layak huni sehingga dilakukan penghapusan/pelelangan. Namun di beberapa pendapatan lainnya mengalami kenaikan yang signifikan seperti pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya yang naik sebesar **332,67%** akibat dari perubahan regulasi dan pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar **80,32%** juga imbas dari perubahan regulasi. Pendapatan penggunaan Sarana dan prasarana sesuai dengan tusi juga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan sebesar **4,95%**.

Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.232.511.428,00 sementara pada Laporan Operasional sebesar Rp. 1.158.724.373,00 selisih lebih besar pada LRA sebesar Rp. 73.787.055,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akun	Uraian	Selisih	Penjelasan
425121	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(40.623.999,00)	Dicatat di LO sebagai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	(33.163.056,00)	Jurnal atas Pendapatan diterima di Muka berupa Sewa Lahan ATM Bank Mandiri
<b>Jumlah</b>		<b>(73.787.055,00)</b>	<b>1.158.724.373,00</b>

## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.717.742.811,00 dan Rp5.090.028.595,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.199.515.820,00	3.430.526.020,00	-6,73
Beban Pembulatan Gaji PNS	48.305,00	51.093,00	(5,46)
Beban Tunj. Anak PNS	86.270.342,00	89.235.556,00	(3,32)
Beban Tunj. Beras PNS	206.759.100,00	219.505.020,00	(5,81)
Beban Tunj. Fungsional PNS	356.206.000,00	394.836.000,00	(9,78)
Beban Tunj. PPh PNS	11.736.840,00	13.137.862,00	(10,66)
Beban Tunj. Struktural PNS	42.070.000,00	33.475.000,00	25,68
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	262.893.404,00	279.696.044,00	(6,01)
Beban Tunjangan Umum PNS	100.385.000,00	104.480.000,00	(3,92)
Beban Uang Makan PNS	451.858.000,00	525.086.000,00	(13,95)
<b>Jumlah</b>	<b>4.717742.811,00</b>	<b>5.090.028.595,00</b>	<b>(7,31)</b>

Beban Pegawai pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-7,31%** dari tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Beban Pegawai diakibatkan karena jumlah pegawai berkurang dikarenakan adanya pegawai yang pensiun sebanyak 4 orang.
2. Beban Tunjangan Struktural bertambah karena adanya kenaikan tunjangan bagi pejabat Struktural.

Terdapat perbedaan nilai belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebesar Rp. 8.749.016,00 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	L R A	LO	Selisih
Belanja Gaji Pokok PNS	3.199.515.820,00	3.199.515.820,00	0,00
Pembulatan Gaji	48.321,00	48.305	16,00
Belanja TunjanganSuami/Istri	262.893.404,00	262.893.404,00	0,00
Tunjangan Anak/PNS	86.270.342,00	86.270.342,00	0,00
Tunjangan Struktural	42.070.000,00	42.070.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional PNS	356.206.000,00	356.206.000,00	0,00
Tunjangan PPh PNS	11.736.840,00	11.736.840,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	206.759.100,00	206.759.100,00	0,00
Uang Makan PNS	460.607.000,00	451.858.000,00	8.749.000,00
Tunjangan Umum PNS	100.385.000,00	100.385.000,00	0,00
Jumlah	4.726.491.827,00	4.717.742.811,00	8.749.016,00

Selisih terjadi disebabkan karena sebagai berikut:

1. Uang makan PNS bulan Desember 2023 karena beban yang harus dibayarkan tahun 2023 tapi dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp. 32.830.000,00.
2. Jurnal Balik Akrua Tahun 2022 sebesar Rp. 41.579.000,00.
3. Pengembalian Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 16,00.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70.674.00000,00 dan Rp46.311.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	70.674.000,00	46.311.500,00	52,61
<b>Jumlah</b>	<b>70.674.000,00</b>	<b>46.311.500,00</b>	<b>52,61</b>

Beban Persediaan Komsumsi mengalami kenaikan dikarenakan Kurangnya kegiatan reguler yang dilaksanakan di Balai tahun 2023 di banding tahun 2022 sehingga terjadi penurunan realisasi sebanyak **52,61%**, disebabkan pemakaian barang konsumsi meningkat seiring bertambahnya kegiatan pelatihan.

Selish Neraca Kas Percobaan dan Laporan Operasional

Uraian	Neraca Kas Percobaan	LO	Selish
Jumlah Belanja/Beban	70.674.000,00	72.601.500,00	(1.927.500,00)
Saldo Awal	2.552.500,00		2.552.500,00
Saldo Akhir	(625.000)		(625.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>72.601.500,00</b>	<b>72.601.500,00</b>	<b>0,00</b>

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.092.376.160,00 dan Rp6.049.789.240,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	5.904.880.410,00	1.408.556.500,00	319,22
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	3.845.000,00	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	85.242.000,00	409.595.000,00	(79,19)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	80.335.200,00	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	225.546.480,00	376.529.650,00	(40,10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123.480.000,00	110.010.000,00	12,24
Beban Honor Output Kegiatan	132.300.000,00	11.700.000,00	1030,77
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	10.874.000,00	(100,00)
Beban Jasa Profesi	453.300.000,00	114.100.000,00	297,28
Beban Jasa Lainnya	18.000.000,00	68.000.000,00	(73,53)
Beban Keperluan Perkantoran	3.536.145.600,00	2.888.031.740,00	22,44
Beban Langganan Air	153.917.920,00	156.863.200,00	(1,88)
Beban Langganan Listrik	344.276.400,00	351.321.450,00	(2,01)
Beban Langganan Telepon	1.137.350,00	1.227.500,00	(7,34)
Beban Sewa	114.150.000,00	58.800.000,00	94,13
<b>Jumlah</b>	<b>11.092.376.160,00</b>	<b>11.092.572.680,00</b>	<b>83,35</b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **83,35%** dari tahun 2022 dikarenakan bertambahnya belanja bahan akibat meningkatnya kegiatan pelatihan.

Saldo pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.092.572.680,00 dan Saldo pada Laporan Operasional Rp. 11.092.376.160,00 terdapat selisih sebesar -Rp. 196.520,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Jurnal Balik Tahun 2022/Pembayaran Utang pada Pihak Ketiga di Tahun 2023 sebesar Rp. 34.462.680,00.
2. Pengakuan Utang pada Pihak Ketiga (Beban Barang yang Masih Harus Dibayarkan) pada Tahun 2023 sebesar Rp. 34.266.160,00.

#### D.5. **Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.855.000,00 dan Rp1.176.855.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	560.690.660,00	596.697.273,00	(6,03)
Beban Pemeliharaan Irigasi	25.500.000,00	76.699.200,00	(66,75)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	529.202.100,00	482.534.800,00	9,67
<b>Jumlah</b>	<b>1.131.992.760,00</b>	<b>1.172.531.273,00</b>	<b>(3,46)</b>

Realisasi Beban pemeliharaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar - **3,46%** dikarenakan adanya penurunan untuk perbaikan dan pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang dialihkan untuk kegiatan lainnya demikian pula untuk pemeliharaan irigasi, tetapi terjadi kenaikan pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, hal ini disebabkan karena banyaknya peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan dan harus mendapatkan perawatan untuk menunjang kegiatan operasional..

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.277.706.527,00 dan Rp2.277.706.527,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.323.438.430,00	1.532.603.150,00	51,60
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.500.000,00	55.000.000,00	(2,73)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.831.778.700,00	525.213.777,00	629,57

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	342.060.000,00	164.889.600,00	107,45
<b>Jumlah</b>	<b>6.550.777.130,00</b>	<b>2.277.706.527,00</b>	<b>187,60</b>

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar **187,60%** dikarenakan meningkatnya kegiatan pelatihan Kerjasama dalam hal Kewirausahaan.

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp270.000.000,00 dan Rp270.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	165.000.000,00	270.000.000,00	(38,89)
<b>Jumlah</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>(38,89)</b>

Realisasi Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-38,89%** dari tahun 2022 karena pada tahun 2023 hanya diserahkan sebanyak 6 P4S dibandingkan tahun 2022 sebanyak 7 P4S. Dimana pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp.165.000.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 270.000.000,00.

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.401.789.407,00 dan Rp25.401.789.407,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	962.339.747,00	1.925.984.698,00	(50,03)
Beban Penyusutan Irigasi	29.933.580,00	59.867.162,00	(50,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.334.166,00	108.668.333,00	(50,00)
Beban Penyusutan Jaringan	7.713.197,00	15.426.395,00	(50,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	606.927.004,00	730.447.238,00	(16,91)
<b>Jumlah</b>	<b>1.661.247.694,00</b>	<b>2.840.393.826,00</b>	<b>(41,51)</b>

**D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	261.887.594,00	0,00	<b>100,00</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	122.336.000,00	<b>(100,00)</b>
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.425.026,00	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>261.887.594,00</b>	<b>124.761.026,00</b>	<b>109,91</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp165.265.182.597,00 dan Rp165.534.138.135,00.

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-26.403.250.808,00 dan Rp-15.953.991.687,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp128.953.860,00 dan Rp0,00.

#### **E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### **E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp128.953.860,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.415.269.044,00 dan Rp15.487.807.399,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	39.740.024.041,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.232.511.428,00
Transfer Masuk	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.507.512.613,00</b>

**E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.232.511.428,00 sedangkan DKEL sebesar Rp39.740.024.041,00.

**E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. yang terdiri dari:

**E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp179.097.220.504,00 dan Rp165.265.182.597,00.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

**F.2. Pengungkapan Lain-lain**